

## KONSEP GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

*Abdul Karim*

Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,  
50603 Kuala Lumpur, Malaysia  
E-mail: abdulkarim678@gmail.com

*Fazzan*

Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam  
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia  
E-Mail: fazzan75@gmail.com

*Zulqarnain*

Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam  
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia  
E-Mail: izul1975@gmail.com

Naskah diterima tanggal 15 Maret 2016, revisi I tanggal 18 April 2016, dan revisi II tanggal 22 Mei 2016

**Abstract:** Gratification has been practiced by Muslim since centuries ago until now. Basically, gratification is a paying a tribute from one to another. But today, there is a legislation rule ban gratification practice. Therefore, this study will be examined the concept of gratification based on Islamic law. This study used descriptive-analytic method and normative approach, which means gratification concept is observed as according to al-Qur'an, hadist and opinion of theologians. The result of this study shows that, gratification has a very broad meaning in Islam, which may take forms in any kinds of tributes or charity. The gratification concept sometimes means shadakah, hibah, gift and risyawah. The sort of gratification in Islam is classified to positive categories and negative categories. Shadakah, hibah and gift are including to positive dividend, these are recommended in Islam. Yet, it will be negative dividend if state officials are as receivers. While risyawah and gift (state officials) are including to negative gratification, these practices are prohibited and immoral (maksiat) based on al-Qur'an, hadist and opinion of theologians. Risyawah and gift (state officials) are categorized to jarimah ta'zir, the doer can be punished with ta'zir penalty, ranging from the heaviest to it should be heaviest and lightest punishment.

**Keywords:** Gratification concept, Islamic law perspective.

**Abstrak:** Gratifikasi merupakan perbuatan yang sudah dipraktekkan oleh umat Islam semenjak dahulu sampai sekarang. Karena pada intinya gratifikasi adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain. Namun dewasa ini ada aturan perundangundangan yang melarang amalan gratifikasi. Untuk itu, dalam kajian ini akan ditelaah konsep berkaitan dengan gratifikasi dalam tinjauan Hukum Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif, yaitu meninjau konsep grati-

fikasi berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama yang telah ada yang berkaitan dengan gratifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa, dalam Islam gratifikasi mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk pemberian. Konsep gratifikasi dalam Islam adakala berupa sedekah, hibah, hadiah, dan risyawah. Bentuk-bentuk gratifikasi dalam Islam tersebut ada yang termasuk ke dalam kategori positif dan kategori negatif. Gratifikasi dalam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk ke dalam amalan gratifikasi positif, amalan tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Namun, amalan ini dapat berubah menjadi amalan negatif apabila penerimanya adalah petugas negara. Adapun gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risyawah termasuk ke dalam gratifikasi negatif, karena dua bentuk amalan gratifikasi ini telah disebutkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama sebagai amalan yang dilarang syara', yaitu suatu amalan maksiat (jarimah). Gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risyawah termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir, maka pelakunya dapat dihukum dengan hukuman ta'zir, mulai hukuman terberat hingga hukuman teringan.

**Kata Kunci:** Konsep gratifikasi, perspektif hukum Islam.

## Pendahuluan

Gratifikasi dengan makna pemberian pada dasarnya merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan memberi gratifikasi karena dengannya akan tercipta rasa kasih sayang di antara sesama. Pemberian gratifikasi dapat menumbuhkan rasa kasih sayang tentunya pemberian yang dilakukan berlandaskan hati nurani yang tulus dan ikhlas, dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Akan tetapi, dalam realitas dan perkembangannya, gratifikasi terkadang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sebagai media untuk mendapatkan keselamatan dan keuntungan. Diantaranya ialah gratifikasi yang diberikan untuk penguasa atau pegawai negara. Ditambah lagi dengan diberlakukannya undan-undang yang melarang amalan gratifikasi dalam masyarakat Indonesia. Padahal amalan tersebut sudah lazim dilakukan oleh masyarakat. Amalan gratifikasi tidak luput berlaku dalam dunia Islam dan juga dipraktikkan oleh orang muslim di Indonesia. Hanya saja istilah gratifikasi secara harfiah tidak dikenal dalam sistem Hukum Islam. Maka dari itu, perlu ada pengkajian untuk mencari perbincangan Hukum Islam mengenai gratifikasi. Dalam melakukan kajian ini

penulis menggunakan metode *deskriptif-analitik*.

## Definisi Gratifikasi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus Hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa Belanda, *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya *gratification* diartikan sebagai hadiah uang. Berdasarkan kedua definisi tersebut, baik dalam kamus Bahasa Indonesia maupun kamus Hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. Definisi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya, amalan gratifikasi bukanlah merupakan suatu amalan tercela atau makna suatu perbuatan negatif. Sedangkan objek gratifikasi dalam kamus Bahasa Indonesia jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus Hukum objek gratifikasi tidak ditentukan.<sup>2</sup>

Adapun definisi gratifikasi dalam undang-undang adalah pemberian dalam arti

1 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tanti Yuniar, (Jakarta: Agung Media Mulia, t.t.), hlm. 224.

2 Eddy OS Hiareij, "Memahami Gratifikasi", Kompas.com, 13 Juni 2011.

luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>3</sup>

Ringkasnya, dalam tinjauan undang-undang tidak semua gratifikasi dilarang. Gratifikasi yang dibolehkan oleh undang-undang adalah pemberian yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa memikirkan diri sendiri artinya pemberian dalam bentuk “tanda terimakasih” tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Sedangkan gratifikasi yang dilarang dalam undang-undang adalah perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan korupsi apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

## Konsep Gratifikasi dalam Hukum Islam

### 1. Gratifikasi dalam Bentuk Sedekah

Sedekah ialah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir dan miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata.<sup>4</sup> Quraish Shihab mengartikan sedekah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi maka sedekah mempunyai arti

lebih luas dari sekedar material.<sup>5</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan sedekah ialah bukan saja memberikan suatu zat (benda) kepada orang lain dengan tujuan karena Allah, tetapi boleh juga suatu perkhidmatan. Sebagaimana hadis Rasul SAW yang diriwayatkan daripada Abu Aiyub yang artinya:

akan kunjungi kepada kalian tentang sebaik-baik sedekah dari pada memberikan suatu benda, ialah bersedekah dengan mendamaikan kedua kelompok yang sedang bersengketa, menyatukan kedua kelompok yang sedang berpecah belah.

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari ‘Abd Allah Ibn ‘Umar, Rasulullah bersabda yang artinya; “sebaik-baik sedekah ialah mendamaikan kedua kelompok yang sedang bertelagah”.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan suatu amalan menyerahkan sesuatu barang/zat untuk dipergunakan atau dimiliki oleh orang lain karena mengharapkan pahala diakhirat nanti, atau mengharapkan ridha Allah. Sedekah boleh berupa zat (benda) yang ketara (materi) boleh juga juga berupa jasa (non materi).

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang disyari’atkan dan hukumnya ialah sunnah. Kesepakatan mereka didasari pada surat al-Baqarah 2: 280.<sup>7</sup> Sedekah ini disunnatkan di setiap saat, tanpa ada batas waktu. Sedekah se-

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 191.

<sup>6</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid Ke-2, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, t.t), hlm. 154.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1619.

3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4 *Kamus Istilah Fiqh*, Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah Syafi’ah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 311.

bagai amalan sunnah diterangkan melalui dalil *al-Qur'an* dan hadis. Adapun dalil tentang anjuran bersedekah dalam *al-Qur'an* seperti yang dinyatakan di dalam QS. al-Baqarah 2: 245. Dan masih banyak lagi ayat *al-Qur'an* yang bercakap tentang sedekah. Adapun dasar hukum sedekah dalam hadis ialah hadis dari Abu Hurayrah.<sup>8</sup>

Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang akan menerima sedekah tersebut akan mempergunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Adakalanya hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang berjumpa dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

## 2. Gratifikasi dalam Bentuk Hibah

Hibah menurut syara' juga diartikan ialah pemilikan yang sunnat ketika hidup.<sup>9</sup> Hibah juga bermakna memberikan pemilikan harta kepada orang lain di saat masih hidup tanpa imbalan.<sup>10</sup> Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, yaitu suatu akad yang pokok perpertanyaannya pemberian harta

milik seseorang kepada orang lain dikala dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Imam Taqy al-Din dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* menjelaskan, yang dimaksud dengan hibah ialah *tamliku bi 'ayri 'iwad* (pemilikan tanpa penggantian).<sup>11</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dengan mudah boleh dikatakan bahwa hibah ialah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni bukan karena mengharapkan pahala dari Allah SWT serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya. Maka apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan maka hal itu tidak disebut hibah, ia disebut dengan *i'arah* (pinjaman). Begitu juga, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pahala, hal seperti ini disebut dengan sedekah. Lain halnya jika tujuannya untuk menghormati atau sebagai penghargaan atas prestasi seseorang baik ia berharap pahala atau tidak, itu dinamakan dengan hadiah.

Adanya hibah juga didasari *al-Qur'an al-Karim*. Dalam *al-Qur'an*, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusannya, do'a-do'a yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Memberi Kurnia. Namun ayat tersebut boleh digunakan anjuran secara awam, agar seseorang memberikan sebahagian rezekinya kepada orang lain, misalnya, QS. al-Baqarah 2: 262 dan QS. al-Munafiqun 63: 10.

8 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Sadaqah, Jilid Ke-2, Hadis No. 1410, (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm.108.

9 Al-Sayyid Abū Bakr, *I'ānah al-Tālibīn*, Jilid Ke-4, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 141.

10 'Abd al-'Adim Ibn Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fī fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz: Kitab al-Taharah wa al-Salah*, Alih Bahasa oleh Tim Tashfiyah LIPIA, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 66.

11 Taqy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, t.t), hlm. 323.

### 3. Gratifikasi dalam Bentuk Hadiah

Najamuddin Ahmad Ibn al-Rafi'ah dalam kitabnya *Kifayah Rasulullah SAW fi Syarh al-Tanbih* yang dikutip oleh 'Abd Ghani Ibn Isma'il dalam *Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risyawah wa al-Hadiyah*, ia berkata, hadiah ialah jenis-jenis kebaikan (pemberian) yang mengandung makna adanya pemindahan hak milik tanpa alat tukar, yang mana kebaikan itu dibawakan ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan untuk memupuk silaturrahim.<sup>12</sup>

Adapun tinjauan Islam berkenaan dengan hukum memberi dan menerima gratifikasi dalam bentuk hadiah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

#### a) Dibolehkan Memberi Hadiah.

Memberi hadiah dan menerimanya serta membalaik kepada yang memberi hadiah itu dibolehkan (tidak dimakruhkan) saling memberi hadiah sesama orang Islam, hukum ini disepakati oleh mayoritas, walaupun ada sebahagian memakruhkannya.<sup>13</sup> Hadiah yang diberikan dapat melahirkan kasih sayang dalam hati, maka sangat wajar jika Rasulullah menganjurkan untuk saling memberi dan menerima hadiah, karena faedah dan manfaatnya amat besar bagi umat Islam. Memberi hadiah ialah dibolehkan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam *al-Qur'an al-Karim* QS. al-Nisa' 4: 4 dan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurayrah.<sup>14</sup>

12 *Ibid.*, 80-81.

13 M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Putra Rizki Putra, 1997), hlm. 445.

14 Al-Turmidhi, *Sunan al-Turmidhi*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab fi Hassi, Jilid Ke-4, Hadis No. 2130, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), hlm. 441.

Dari dua dalil tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pemberian hadiah dianjurkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah. Hadiah merupakan suatu lambang kasih sayang diantara sesama manusia. Tidak dilihat besar dan kecilnya pemberian tersebut.

Adapun tentang menerima hadiah dibolehkan juga berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa' 4: 4 di atas. Dan hadis-hadis yang menunjukkan dibolehkannya menerima hadiah sangatlah banyak. Di antaranya ialah hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn 'Umar,<sup>15</sup> hadis riwayat Malik dari 'Ata' Ibn Yasar,<sup>16</sup> hadis riwayat Ahmad dari al-Muttalib Ibn 'Abd Allah Ibn Hantab,<sup>17</sup> hadis riwayat Ahmad dari Khalid Ibn 'Ady al-Juhany,<sup>18</sup> dan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurayrah.<sup>19</sup>

#### b) Rasulullah juga Menerima Hadiah.

Rasulullah ialah manusia yang dijamin oleh Allah terhindar dari kesalahan (*ma'sum*). Beliau ialah manusia yang

15 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, *Op. Cit.*, hlm. 123.

16 Malik, *Mawata' al-Imam Malik*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Ma Ja'a fi al-Ta'afuf 'an al-Masa'alah, Jil. Ke-2, Hadis No. 9, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), hlm. 998. Lihat 'Abd Ghani Ibn Isma'il, *Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risyawah wa al-Hadiyah* (t.t.p.: Maktabah al-Qur'an, 2003), hlm. 38.

17 Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab I 'ta' al-Ghani min al-Tatawu', Jil. Ke-6, Hadis No. 12043, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 305.

18 Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Hadith Khalid Ibn 'Ady al-Juhany 'an al-Nabi SAW, Jil. Ke-29, Hadis No. 17936, (t.t.p: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 456. Sanad hadis ini sahih. Disamping itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al-Tabrani, Ibn Hibban dan Hakim.

19 Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam*, Jilid Ke-13, *Op. Cit.*, hlm. 299.

sempurna, karena setiap amalan yang ia lakukan tidak terlepas dari pantauan dan tuntunan Allah. Ia melakukan sesuatu bukan mengedepankan keinginannya semata, tetapi selalu dibimbing oleh wahyu. Untuk itu, Rasulullah sekalipun menerima hadiah, sudah pasti akan terhindar dari amalan-amalan yang menyimpang. Keputusan yang ia berikan boleh dipastikan tidak akan terpengaruh oleh hadiah yang beliau terima. Oleh karena itu, hadiah yang Nabi terima bukanlah hadiah yang terlarang dan *risyawah*.

Banyak dalil yang menerangkan tentang Rasulullah SAW menerima pemberian hadiah dari orang lain. Hal itu boleh dilihat dari beberapa hadis Nabi yang di riwayat al-Bukhari dari Abi Hurayrah,<sup>20</sup> hadis riwayat al-Bukhari dari Anas,<sup>21</sup> hadis riwayat al-Tabrani dari Anas Ibn Malik,<sup>22</sup> hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Hurayrah,<sup>23</sup> dan hadis riwayat Abu Dawud dari Anas Ibn Malik.<sup>24</sup>

Sebagai contoh lainnya, Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari penguasa Qibti. Penguasa Koptik pernah memberikan hadiah kepadanya berupa dua hamba sahaya perempuan yang bersaudara dan seekor hewan sejenis kuda. Lalu Nabi memandu hewan tersebut

but di Madinah dan mengambil salah satu hamba sahaya itu untuk dirinya, yang kemudian melahirkan Ibrahim. Sedangkan hamba sahaya yang satu lagi diberikan kepada Hasan Ibn Thabit, yang kemudian melahirkan anak yang bernama Muhammad.<sup>25</sup>

Sekurang-kurangnya dari beberapa hadis yang telah penulis kemukakan jelaslah Rasulullah menerima pemberian hadiah, mulai dari pemberian oleh masyarakat biasa hingga para bangsawan negara atau penguasa. Penerimaan Rasulullah SAW terhadap hadiah merupakan salah satu wujud kemurahan hatinya dan satu bentuk akhlak yang baik yang akan menyatukan hati. Memakan makanan yang dihadiahkan dan memakai baju yang merupakan hadiah ialah salah satu syi'ar Rasulullah SAW dan salah satu ciri beliau sebagaimana tersurat dalam *nas*.

- c) Tidak Boleh Memberi Hadiah kepada Hakim dan Pejabat.

Dalam perbahasan yang lalu, dibolehkan memberi dan menerima hadiah kepada sesama rakyat biasa, menerima hadiah dari penguasa, dan Rasulullah pun pernah menerima hadiah. Akan tetapi bagi pejabat atau pegawai negara seperti hakim dan lain-lain dilarang menerima hadiah. Dengan begitu dilarang juga bagi yang

20 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid Ke-3., Op. Cit., hlm. 155.

21 *Ibid.*, Bab I'za Tahawalat al-Sadaqah, Jilid Ke-2, hlm. 128.

22 Al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Awsat*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Man Baqiyah min Awali Ismihi Mim min Ismihi Musa, Jilid Ke-8, Hadis No. 8235, (al-Qahirah: Dar al-Haramayn, t.t), hlm. 150.

23 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid Ke-3, Op. Cit., hlm. 153.

24 Abu Dawud, *Musnah Abi Dawud*, al-Maktabah al-Syamilah, Jilid Ke-3, Hadis No. 2169, (Mesir: Dar Hijr, 1999), hlm. 537.

25 Qutaybah al-Daynuri menulis dalam kitabnya *al-Ma'arif*, sebagaimana yang dikutip oleh 'Abd Ghani bin Isma'il dalam *Tahqiq al-Qadiyah*, ketika menyebut anak-anak Rasulullah SAW. Qutaybah al-Daynuri mengatakan, Ibrahim ibn Mariyah al-Qibtiyah dilahirkan di Madinah selepas lapan tahun kedatangan Rasulullah SAW ke sana, ia hidup selama satu tahun, sepuluh bulan, dan lapan hari. Ibunya, Mariyah al-Qibtiyah merupakan hadiah dari Muqawqis, penguasa Iskandariyah, untuk Rasulullah SAW. Lihat, 'Abd Ghani bin Isma'il, *Op. Cit.*, hlm. 70-71.

memberinya. Karena pemberian hadiah kepada pegawai negara termasuk dalam amalan hadiah yang diharamkan. Hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak baik efeknya. Apalagi memberi hadiah kepada orang yang semula belum pernah memberi hadiah ketika dia belum memangku jabatannya. Dalam hujjah hukum Islam, mengantisipasi untuk tidak terbukanya peluang untuk terjadinya penyelewengan ini disebut *sadd al-dhari'ah*. Karena diduga pemberian hadiah tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu, tidak sekedar kasih sayang atau persaudaraan. Hal itu barangkali dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, baik berupa pekerjaan, perlindungan, dukungan, dan pertolongan. Kalau sudah demikian bentuknya, maka itu bukan lagi hadiah sebagaimana yang telah ditakrifkan, melainkan sudah merupakan bentuk kemaksiatan, karena pemberian itu tidak dimaksudkan untuk suatu kebaikan, yaitu keinginan untuk mendapat ridha Allah SWT.

Pemberian hadiah kepada penguasa dilarang berdasarkan *al-Qur'an al-Karim* QS. 'Ali 'Imrān 3: 161 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukhārī dari Abi Humayd al-Sai'dy,<sup>26</sup> hadis riwayat Muslim dari 'Adī Ibn 'Amiyrah al-Kindy,<sup>27</sup> hadis riwayat al-Bukhārī dari Abu Hurayrah,<sup>28</sup> dan hadis riwayat Ahmad dari Abi Humayd al-Sai'dy.<sup>29</sup>

26 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid Ke-9, Op. Cit., hlm. 70.

27 Muslim, *Sahih Muslim*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Tahrim Hadaya al-'Amal, Jilid Ke-3, Hadis No. 30, (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm. 1465.

28 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid Ke-4, Op. Cit., Hadis No. 3073.

29 Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam*, Jilid Ke-39, Op. Cit., hlm. 14.

Dari ayat *al-Qur'an* dan hadis-hadis di atas, walaupun bukan khusus bercakap tentang konteks pemberi hadiah, karena dalam ayat dan hadis di atas lebih kepada dilarangnya menerima pemberian apabila dia sebagai pegawai negara, namun larangan untuk memberikan boleh dipahami melalui *mafhum mukhalafah*, yaitu dilarangnya petugas mengambil sesuatu pemberian bermakna larangan bagi seseorang memberikannya. Jadi, dari pemahaman *mafhum mukhalafah nas-nas* tersebut boleh dipahami bahwa bentuk amalan yang mengatasnamakan hadiah kepada penguasa atau pegawai negara ialah haram hukumnya.

Tentang pembahasan sebelumnya, bahwa Rasulullah pernah menerima hadiah, itu khusus bagi Nabi, sedangkan untuk hakim atau penguasa selain Nabi diharamkan menerima hadiah dan memberikan hadiah untuknya, sekalipun tanpa adanya permintaan. Karena pemberian hadiah kepada selain Nabi, termasuk ke dalam amalan yang dilarang. Hal ini sebagaimana kita fahami dari *nas al-Qur'an* dan hadis di atas. Disamping itu juga pernah dijelaskan oleh 'Umar bin 'Abd al-'Aziz, ia suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolaknya karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata, "Rasulullah pernah menerima hadiah". Lalu 'Umar menjawab, "hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu ialah *risywah*".<sup>30</sup> Jadi, setiap hadiah yang diberikan kepada pegawai karena kedudukannya sebagai seorang pegawai tidak boleh diterima dan haram

30 Muhammad Yūsuf al-Qardāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1994), hlm. 230.

hukumnya karena andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di rumahnya nescaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.

Dengan demikian, hadiah juga serupa dengan pemberian yang diharamkan, apabila hadiah itu diberikan kepada pengusa. Hanya saja hukum hadiah boleh berubah bergantung pada masing-masing atau pihak yang berkaitan dengannya. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut, dalam Islam dibolehkan memberi hadiah kepada sesama dan boleh menerima hadiah dari orang yang sederajat dan penguasa asalkan hadiah itu berpunca dari harta yang baik, bukan diperolehnya dengan cara yang haram. Adapun memberikan hadiah kepada penguasa dilarang, karena ditakutkan akan menyimpang dari prinsip-prinsip pemberian hadiah, artinya kemungkinan tidak lagi hanya sekedar kasih sayang dan penghargaan, tetapi ditakutkan punya maksud-maksud tertentu. Untuk menganntisipasi perkara tersebut, maka Rasulullah dan para sahabat menjangka sejak awal dengan mengharamkan pemberian hadiah kepada penguasa, hakim dan pelaksana negara lain.

d) Gratifikasi dalam Bentuk Risyawah.

Al-Sayyid Abū Bakr mendefinisikan *risyawah* dengan “memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar/adil.”<sup>31</sup> Definisi yang lebih kurang sama diberikan oleh al-Jurjānī.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Ibrahim al-Nakha’ī, *risyawah* ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan

kebatilan atau untuk menghancurkan kebenaran. Syaykh ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh bin Baz mendefinisikan *risywah* dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai pampasan pelaksanaan maslahat (tugas/kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu ganjaran atau uang tip.<sup>33</sup>

Dalam kitab *Kasyf al-Qanna’ an Matn al-Iqna'*, karangan Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti. Definisi yang ada dalam kitab ini menurut penulis cukup menarik sebab ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua dalam rangka mencegah pihak kedua agar tidak menzalimnya dan agar pihak kedua mahu melakukan kewajibannya maka pemberian semacam ini tidak dianggap *risywah* yang dilarang agama.<sup>34</sup> Senada dengan pengandaian yang dikemukakan oleh al-Bahuti di atas, Syams al-Haq al-‘Adim juga mempunyai pandangan yang hampir sama dengan al-Bahuti.<sup>35</sup> Akan tetapi menurut Syams al-Haq, pemberian atau *risywah* itu dilakukan harus dengan niat agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima *risywah* boleh diubah semakin baik. Dalam definisi ini dikemukakan sebuah pengandaian, yaitu seandainya pihak kedua melakukan kezaliman terhadap pihak pertama dan pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap pihak pertama, maka dalam isu ini boleh diberikan

33 Abū Abdul Halim Ahmad. S., *Suap, Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 20-21.

34 Al-Bahuti, *Kasyf al-Qanna’ an Matn al-Iqna'* Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 316.

35 M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 90.

31 Al-Sayyid Abū Bakr, *Op. Cit.*, hlm. 232.

32 ‘Ali al-Jurjānī, *al-Ta’rifāt*, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://alwarraq.com>, al-Isdār al-Thānī, hlm. 111.

sesuatu berupa *risyawah*.

Dari uraian di atas boleh disimpulkan bahwa, *risyawah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau pejabat dan lain-lain dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan adakala berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sehingga keinginan pemberi *riyawah* menjadi kenyataan. Dan amalan sedekah, hibah, hadiah, dan waqaf boleh berubah menjadi *risyawah* apabila pembeiran itu diperuntukkan kepada penguasa atau pegawai negara, dan kepada pihak lain apabila pemberian tersebut bertujuan agar pihak penerima menuruti kemauan pihak pemberi.

Ibn ‘Abidin dengan mengutip kitab *al-Fath*, mengemukakan empat macam bentuk *risyawah*. Pertama, *risyawah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risyawah* untuk mendapatkan keuntungan dalam kehakiman dan pemerintahan. Kedua, *risyawah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. *Risyawah* model ini haram bagi yang memberi dan menerima. Ketiga, *risyawah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. *Risyawah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Dan keempat, *risyawah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberi dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan dari orang muslim ialah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.<sup>36</sup>

Menurut penulis, subtansinya ada

dua bentuk *risyawah* apabila ditinjau dari tujuan melakukannya. Pertama, *risyawah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, pemberian untuk membatalkan kebenaran dan membenarkan yang batil. Amalan *risyawah* ini boleh mengalahkan pihak yang semestinya menang dan memenangi pihak yang sepatutnya kalah. Dan kedua, *risyawah* yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang sepatutnya diterima oleh pemberi (*al-rasyi*) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidak adilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut. Dalam arti lain, yaitu pemberian untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman.

Berdasarkan kategori *risyawah* yang penulis simpulkan di atas, maka hukum *riyawah* ada dua pula, yaitu *risyawah* yang hukumnya haram dan *risyawah* yang hukumnya halal. Namun hukum dasar *risyawah* ialah haram. Hal ini berlandaskan banyak sekali dalil-dalil, baik *al-Qur'an*, hadis, maupun dalil-dalil ijtihadi lain yang menjerangkannya yang akan penulis uraikan berikut ini:

### 1) Risyawah yang Hukumnya Haram.

Syariat Allah ialah cahaya yang menerangi kegelapan, maka setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan di atas kebenaran hukumnya haram. Dengan demikian, *risyawah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar hukumnya jelas haram. Karena hal ini sangat dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya amalan tersebut termasuk amalan yang *batil*.

<sup>36</sup> Muhammad Amin, *Khususiyah Ibn ‘Abidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), hl. 78.

Dalil *al-Qur'an* tentang larangan dan haramnya amalan *risywah* tersebut ialah QS. al-Baqarah 2: 188, QS. al-Mai'dah 5: 42, QS. al-Mai'dah 5: 62 dan 63.

Dari uraian pendapat para mufasirin dalam mengomentari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah mengharamkan *risywah* dimana hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Di dalam QS. al-Baqarah 2: 188 Allah melarang memakan harta dengan cara batil atau haram apapun jalannya. Namun di ayat tersebut terdapat *qarinah* (bukti yang menguatkan) bahwa yang dimaksudkan ialah *risywah*. Larangan tersebut diperkuatkan dengan QS. al-Mai'dah 5: 42, 62 dan 63 yang merupakan celaan yang amat buruk bagi orang-orang Yahudi karena melakukan *risywah*. Maka jelas sekali pandangan *al-Qur'an* bahwa *risywah* merupakan kejahatan awam yang diharamkan oleh Allah dan merupakan kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi.

Adapun keharaman *risywah* dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keharaman *risywah*. Di antara ialah hadis riwayat Abu Dawud,<sup>37</sup> hadis riwayat Ibn Majah dari 'Abd Allah Ibn 'Umar,<sup>38</sup> dan hadis riwayat Al-Turmizi dari Abu

37 Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, Bab fi Kirahiyah al-Risyawah, Jilid Ke-3., Hadis No. 3580, hlm. 300. Al-Hakim, *Mustadrak 'Ala Sahihayn*, Jil. Ke-4, Hadis No. 7066, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm. 115.

38 Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab al-Ta'liz fi al-Hayf wa al-Risyawah, Jilid Ke-2, Hadis No. 2313, (t.tp: Dar 'Ihya' al-Kitab al-'Arabiyyah, t.t), hlm. 775.

Hurayrah.<sup>39</sup>

Dari hadis-hadis tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya melaknat orang yang melakukan *risywah*. Namun celaan juga dialamatkan bagi orang yang menerima *risywah*. Hadis-hadis di atas memberikan pandangan bahwa *risywah* haram baik orang yang memberikan maupun menerimanya.

Selain *al-Qur'an* dan hadis, keharaman *risywah* juga sudah menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*). Banyak sekali dalil *ijma'* yang menyebutkan bahwa *risywah* haram. Salah satunya seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam *al-Jami' li Ahkam*, ketika menafsirkan QS. al-Mai'dah 5: 42, ia mengatakan, "Dan tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan *risywah* untuk menolak yang hak atau dalam perkara yang dilarang merupakan *riyshawah (suht)* yang haram."<sup>40</sup> Sedangkan dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*, Imam al-Ramli yang digelar sebagai al-Syafi'i *al-Saghir* (Imam al-Syafi'i kecil) menjelaskan, "Bila saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak *haq* atau menolak berhukum dengan yang *haq* maka ia telah berbuat *risywah* yang diharamkan secara *ijma'*".<sup>41</sup>

Hamd Ibn 'Abd al-Rahman al-Junayd dalam bukunya juga menjelaskan haramnya *risywah* secara

39 Al-Turmidhi, *Sunan al-Turmidhi*, Jilid Ke-4, Op. Cit., hlm. 614.

40 Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 183.

41 Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Jilid Ke-8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 255.

*ijma'*, sebagaimana petikannya berikut ini, “Dan sungguh telah bersepakat para sahabat dan pengikut, begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya *risywah* dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat *nasan-nas* yang menjelaskan tentang pelaksanaan dan tafsiran apa yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin”.<sup>42</sup>

Berdasarkan dalil-dalil keharuman *risywah* di atas, baik *al-Qur'an*, hadis, dan konsensus (*ijma'*) para ulama, maka *risywah* dengan segala bentuknya ialah haram. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk amalan *risywah* ialah pemberiah (hadiah) yang tujuannya untuk kebatilan. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pegawai yang meski tidak sedang berkaitan perkara atau urusan, karena kalau ada kebiasaan memberi hadiah sebelum menjadi pegawai, setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan jumlah kebiasaan pemberian hadiah tersebut.<sup>43</sup> Seorang pegawai juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, nescaya orang tersebut tidak akan memberikannya.<sup>44</sup>

42 Hamd Ibn 'Abd al-Rahman al-Junayd, *Atharu Risyawah fi Ta'thuri Namwi al-Iqtisadi wa Asalib Daf'iha fi Zilli Syari'ah Islamiyah*, (Riyad: al-Markas al-'Arabi li Dirasah al-Amniyyah wa Tadrib, 1982), hlm. 5.

43 Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Rad al-Mikhtar 'alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn 'Abidin*, Jilid Ke-4, (Beirut: Dār al-Ihyā', 1987), hlm. 34.

44 *Ibid.*, Jilid Ke-5, hlm. 373.

Gambaran di atas memperlihatkan ketegasan sikap ulama terhadap amalan *risywah*. Bahkan dalam konteks kehakiman, para ulama melakukan tindakan preventif dengan mengharamkan penerimaan hadiah oleh seorang *qadi* padahal itu belum secara automatik boleh disebut *risywah*. Seorang *qadi* tidak boleh menerima hadiah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lain bila si pemberi tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat). Atau orang itu pernah memberinya hadiah, tetapi setelah ia memangku jabatannya, orang tersebut melebihkan jumlah dan jenisnya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *I'anah al-Tālibīn*.<sup>45</sup>

Dari keterangan di atas, terlihat dimana kecenderungan emosional manusia boleh mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Bagi mereka yang memegang kuasa di sektor awam, keadaan ini boleh membawa kerugian bagi pihak lain dan harus dicegah sejak awal. Sama halnya dengan larangan memutuskan perkara dalam keadaan emosi sedang tidak normal. Atas partimbangan itu, muncullah ketetapan hukum yang mana seorang hakim tidak dibenarkan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi rakan kerjanya. Tetapi mereka diputuskan oleh imam atau hakim yang lain, atau pengantinya. Hal ini untuk mengelakkan tuhmah (isu pembicaraan tidak baik). Hakim tidak dibenarkan memutuskan suatu dasar atau hukum bagi sebahagian orang tua (ibu

45 Al-Sayyid Abū Bakr, *Op. Cit.*, hlm. 229.

bapak) dan anak-anaknya, karena hal ini boleh menimbulkan jurang di pihak lain, mereka akan menilai dalam proses pengambilan keputusan terdapat unsur nepotisme. Demikian juga kepada saudara-mara atau rakan kongsinya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur pakatan sulit.

Oleh karena itu, bagi seorang imam (pimpinan), pejabat, dan petugas haram menerima pemberian dari sesiapa, karena hal ini boleh melemahkan kredibiliti seorang pemimpin yang ideal berperanan sebagai pihak yang netral terhadap seluruh rakyatnya. Dengan menerima pemberian, termasuk hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap dasar. Apalagi pelaku memberikan *risywah* jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengurangkan hak orang lain.

## 2) Risyawah yang Hukumnya Halal.

Sebahagian ulama membolehkan (*rukhsah*) amalan *risywah* (pemberian) yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang sepatutnya diterima oleh pemberi (*al-rasyi*) atau untuk menolak kemudarat, kezaliman, dan ketidak adilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut. Karena pemberian tersebut bertujuan untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. Mayoritas ulama berpendapat, *risywah* jenis kedua ini, yang menanggung dosanya hanya orang yang menerimanya.

Abu Lays al-Samarqand berkata, "dalam kasus separti ini (*risywah* untuk mencegah kezaliman) tidak ada masalah jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain demi mencari kebenaran."<sup>46</sup> Termasuk juga orang yang dibenarkan menyerahkan hartanya karena kasus selamatannya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri. Pemberian *risywah* separti ini tidaklah dilarang, sebagaimana yang dimaksud dalam berfirman Allah SWT QS. Al-Baqarah 2: 286.

Dengan demikian, *risywah* untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezaliman itu dibenarkan jika memang tidak ada penyelesaian lain dan jika tidak diberikan *risywah* justru akan menghasilkan bahaya yang lebih besar.

Berdasarkan uraian konsep gratifikasi di atas, kelihatan bahwa dalam Islam, secara garis besar, gratifikasi dengan berbagai macam bentuknya terbahagi ke dalam dua kelompok. Ada yang pada dasarnya bernilai positif, dimana syara' memang menganjurkan akan hal itu, seperti sedekah, hibah, serta hadiah, dan ada yang pada dasarnya bermakna negatif, yaitu *risywah* atau hadiah yang diberikan kepada penguasa yang memang sangat dilarang Islam. Bahkan boleh jadi gratifikasi yang mengandungi nilai positif itu boleh berubah menjadi negatif, hal itu sangat bergantung dari tujuan diberikan dan kepada siapa dia memberikannya. Untuk itu, gratifikasi positif akan mendapat ganjaran positif. Dan gratifikasi negatif tentunya akan mendapat huku-

46 'Abd Allah bin 'Abd Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9-11.

man yang negatif pula.

### Hukuman Terhadap Pelaku Gratifikasi dalam Islam

Gratifikasi yang mengandung nilai positif akan mendapatkan balasan yang positif, jika niat dalam melakukan amalan itu semata-mata karena Allah, bukan karena dipengaruhi oleh faktor lain selain diri-Nya. Di antara ganjaran-ganjaran kebaikan itu ialah, nanti sebagian besarnya akan diperolehi di akhirat. Orang yang memberi sedekah, hibah, dan hadiah, akan menuai hasilnya nanti, bergantung seberapa besar pemberian itu di dunia. Bila dia berbuat banyak, maka dia akan mendapatkan banyak, tidak akan luput kebaikan itu dari balasan Allah nanti, walau sedikit pun. Allah menjanjikan, apa saja yang diberikan seseorang dengan ikhlas, pasti akan memperoleh balasan. Orang-orang yang memberikan harita mereka di jalan Allah tanpa takut menjadi miskin, akan memperoleh rahmat yang sangat menakjubkan. Apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah akan dianjar sepenuhnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Allah SWT melalui beberapa firmannya dalam *al-Qur'an al-Karim* QS. Al-aqarah 2: 272.

Hukuman adalah balasan untuk pelaku amalan yang dilarang dalam syariat Islam yang sering disebut dengan *al-'uqubah*. Dimana hukuman merupakan suatu bentuk akibat yang harus ditanggung akibat melalukan sesuatu yang dilarang dalam agama (*jarimah*), sebagai pemberi kasusan penghalang untuk pelaku dan juga sebagai pembelajaran untuk orang lain agar tidak melakukan amalan yang sama. Dikarena gratifikasi bentuk *risyawah* dan hadiah kepada petugas negara dalam Islam merupakan suatu pesalahan terhadap aturan syariat (*al-jarimah*), maka bagi pelaku amalan tersebut layak untuk diberikan huku-

man ('*uqubah*).

Dengan melakukan analisa terhadap tiga macam *ta'zīr*, yaitu, *al-ta'zīr 'alā al-ma'āsī*, *al-ta'zīr li al-maslahah al-'ammah*, dan *al-ta'zīr 'ala al-mukhalafāt*, maka gratifikasi dalam bentuk *risyawah* termasuk ke dalam kategori *ta'zīr al-ta'zīr 'alā al-ma'āsī*. Hal ini disebabkan, *risyawah* merupakan suatu amalan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya melalui *nas*, hanya saja hukumnya yang tidak dijelaskan dalam *al-Qur'an* dan hadis. Oleh karena itu ia masuk dalam kategori *ta'zīr*. Karena ada penyebutan pengharaman amalannya saja dalam *nas* belum cukup memasukkannya ke dalam klasifikasi hukuman *hudud*. Jadi gratifikasi dalam bentuk *risyawah* merupakan maksiat yang diharamkan selama-lamanya, untuknya dapat diganjar dengan hukuman yang berlaku untuk *jarimah ta'zīr*.

Sedangkan hukuman dalam bentuk hadiah boleh dikumpulkan kedalam *al-ta'zīr li al-maslahah al-'ammah*. *Al-ta'zīr li al-maslahah al-'ammah* hukumnya dilarang apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, karena tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat. Hal ini sama persis apa yang terdapat pada hadiah. Hadiah pada dasarnya ialah suatu amalan yang dianjurkan, kemudian dikarenakan pemberian itu kepada penguasa, maka itu sudah memenuhi syarat amalan tersebut menjadi maksiat. Jadi memberinya kepada pegawai menjadi sebab hadiah dilarang. Dalam sisi yang lain, hadiah ini juga termasuk ke dalam *al-ta'zīr 'alā al-ma'āsī*, karena hadiah kepada penguasa memang sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, sesuatu yang dilarang oleh Nabi berarti suatu kemaksiatan. Jadi, ditinjau dari segi hadiah secara awam, maka hukuman dalam bentuk hadiah termasuk *al-ta'zīr li al-maslahah al-'ammah*. Dan ditinjau dari segi khusus, hadiah kepada penguasa, hukuman hadiah termasuk dalam *al-ta'zīr 'alā al-ma'āsī*. Sedikit

penulis tambah, segala bentuk amalan gratifikasi dalam Islam, sekalipun pada awalnya bukan maksiat, maka boleh dikumpulkan ke dalam *al-ta'zīr li al-maslahah al-'ammah* jika amalan tersebut boleh terbukanya peluang kepada kemaksiatan, misalnya sedekah, hibah, waqaf, yang mana penerimanya ialah pengusa. Hal ini untuk menjangka kemungkinan berlakunya *risyawah*.

Maka dari itu, hukuman untuk amalan gratifikasi yang diharamkan dalam Islam ialah dalam bentuk hukuman *ta'zir*, hakim diberikan kuasa untuk menjatuhkan hukuman untuknya, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai kepada hukuman yang paling berat sesuai dengan pesalahan atau kesalahan dalam gratifikasi. Untuk itu, jenis-jenis hukuman untuk amalan gratifikasi tersebut sangat berbeda, dan hakim mempunyai hak untuk menetapkan salah satunya. Jadi jenis-jenis hukuman atau hukuman untuk kategori *jarimah ta'zīr* gratifikasi ialah sebagai berikut:<sup>47</sup>

### 1. Hukuman Mati

Hukuman mati dalam *jarimah ta'zīr* disebut dengan *al-qatl al-siyāsah*.<sup>48</sup> Pada hakikatnya, tujuan utama hukuman *ta'zīr* ialah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak

sampai membinasakan. Dengan begitu seharusnya dalam hukuman terhadap amalan *ta'zīr* tidak termasuk pemotongan anggota badan, apalagi sifatnya sampai menghilangkan nyawa. Akan tetapi, ada sebahagian ahli hukum Islam memberikan pengecualian dari ketetapan awam tersebut, sehingga dibolehkannya pemberian hukuman hukuman mati dalam kategori *jarimah ta'zīr*. Hal demikian dibolehkan jika kepentingan awam menghendaknya atau apabila pembasmian terhadapnya tidak boleh terealisasi kecuali dengan jalan menghukumnya sampai mati (membunuohnya).

Hukuman mati yang merupakan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zīr* boleh dijatuhkan seperti kepada pelaku *jarimah mata-mata*, pembuat fitnah, pelaku *bid'ah* dan perogol yang membahayakan. Sukar memang mengatakan bahwa di dalam *jarimah ta'zīr* tidak ada hukuman mati.<sup>49</sup> Oleh karena itu hukuman dalam bentuk hukuman mati boleh dilaksanakan bagi pelaku *jarimah ta'zīr* tertentu. Karena kasusan kerosakan yang ditimbulkannya cukup luar biasa. Kasusan ini sama halnya dengan apa yang berlaku pada gratifikasi, kasusan yang ditimbulkannya sudah merosakkan tatanan sosial masyarakat.

### 2. Hukuman Cambuk

Para ulama sepakat memasukkan cambuk ke dalam salah satu daripada hukuman terhadap *jarimah ta'zīr*. Namun para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan batas tartinggi hukuman cambuk dalam *ta'zīr*. Imām Abū Hanīfah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tartinggi hukuman cambuk dalam *ta'zīr* ialah tiga puluh sembilan kali, dan menurut Abū Yūsuf ialah tujuh puluh lima kali. Sementara di kalangan Syāfi'iyyah ada tiga pendapat. Pertama, sama dengan pendapat

47 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jina'ī al-Islāmī*, Jilid Ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), hlm. 687-708.

48 Hukuman mati dalam *jarimah ta'zīr* disebut dengan *al-qatl al-siyāsah* karena dalam penetapannya ada campur tangan pengusa atau hakim. Tentunya hal ini berbeda dengan hukuman mati pada kasus *qisās-diyāt* dan *hudūd* yang dikenal dengan sebutan *al-qatl al-syar'i*. Penyebutan *al-qatl al-syar'i* terhadap hukuman mati pada hukuman *qisās-diyāt* dan *hudūd* dikarenakan ketentuannya sendiri sudah diatur oleh nas (al-Qur'an atau hadis) sehingga tidak ada peluang bagi pengusa atau hakim untuk merubahnya, baik dalam artian menambah ataupun menguranginya. *Ibid.*

49 *Ibid.*

Abū Hanīfah dan Muhammad, yaitu batas taringgi hukuman dalam *ta‘zīr* ialah tiga puluh sembilan kali. Kedua, sama dengan pendapat Abū Yūsuf yaitu tujuh puluh lima kali jilid. Dan pendapat ketiga, hukuman cambuk pada *ta‘zīr* boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarīmah ta‘zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah hudūd*.

Menurut pendapat yang popular di kalangan ahli fikih Mālikī, batas taringgi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta‘zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan disesuaikan berdasarkan berat dan ringannya pesalahan.<sup>50</sup> Jadi dalam pendapat ini tidak adanya sekatan minimum dan maksimum dalam pemberian hukuman *ta‘zīr*; hukuman yang diberikan sangat bergantung kepada situasi dan keadaan dengan partimbangan utama ialah kemaslahatan bagi masyarakat awam, bukan partimbangan individu atau kelompok tertentu.

### 3. Hukuman Penjara

Hukuman dalam bentuk penjara atau disebut juga dengan hukuman kurungan dalam Hukum Islam ada dua bentuk, yaitu pertama penjara terhad atau sementara (ada batas masa tertentu). Batas terendah dari hukuman dalam bentuk penjara terhad ini ialah satu hari, sedangkan batas tartingginya menurut Syāfi‘iyyah ialah selama satu tahun, dengan mempersamanakan (menganalogikan)-nya kepada pengasingan dalam *jarīmah al-zinā*. Sedangkan ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa dengan mempartimbangkan *al-maslāhāh*. Kemudian yang kedua penjara tidak terhad (tidak ditentukan batas masanya,

mungkin penjara seumur hidup atau sampai batasan bertaubat).<sup>51</sup>

### 4. Hukuman Disalib

Hukuman dalam bentuk salib selain terdapat pada hukuman untuk *jarīmah ta‘zīr* juga terdapat pada hukuman untuk *jarīmah hudūd*. Akan tetapi hukuman dalam bentuk salib pada hukuman *ta‘zīr* tidak disertai oleh hukuman mati, namun pelakunya disalib dalam keadaan hidup dan dibolehkan untuk makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu’, tetapi dalam mengerjakan solat cukup dengan *isyārah* saja. Dan batasnya menurut ahli fikih tidak boleh melebihi dari tiga hari lamanya.<sup>52</sup>

### 5. Hukuman Pengasingan

Pengasingan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-hajr* merupakan salah satu daripada hukuman untuk *jarīmah ta‘zīr* yang boleh dipilih oleh hakim untuk ditetapkan kepada pesalah *jarīmah ta‘zīr*. Rasulullah pernah melakukan hukuman untuk *jarīmah ta‘zīr* dalam bentuk pengasingan bagi para pelaku *jarīmah*, yaitu terhadap tiga orang (Ka‘ab bin Mālik, Mirārah Ibn Rubay‘ah, dan Hilāl Ibn ‘Umayyah) yang mana ketiganya tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Mereka dipulaukan oleh masyarakat dengan tidak diajak bicara selama lima puluh hari, sehingga pada akhirnya turunlah ayat QS. al-Tawbah 9: 118.

### 6. Hukuman Denda

Islam juga mengenakan hukuman denda terhadap pelaku *jarīmah* yang digolongkan dalam kategori *ta‘zīr*. Misalnya mengenai pencurian buah yang masih di pohonnya, hukuman-

<sup>50</sup> Ibid., 689-694. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 5601.

<sup>51</sup> Abd al-Qādir ‘Awdah, *Loc. Cit.*

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 689.

nya berupa denda dua kali ganda harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan amalannya tersebut. Demikianlah yang ditegaskan oleh Nabi SAW berikut ini, “Dan barangsiapa yang membawa sesuatu ke luar, maka atasnya denda sebanyak dua kali beserta hukuman”. Dan hukuman yang sama juga dikenakan kepada orang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>53</sup>

Di samping hukuman yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa bentuk hukuman *ta’zir* lain yang boleh dikenakan kepada pelaku gratifikasi menurut hukum Islam, misalnya hukuman dalam bentuk pengasingan, hukuman dalam bentuk celaan, hukuman dalam bentuk *tasyhir* (yaitu penerbitan dengan tujuan untuk memaklumkan kepada masyarakat tentang kejahatan yang dilakukannya, ini termasuk hukuman moral), hukuman dalam bentuk ancaman, hukuman dalam bentuk teguran, dan hukuman dalam bentuk peringatan,<sup>54</sup> dan lain-lain. Intinya, *jarimah ta’zir* gratifikasi dalam bentuk *risywah* dan hadiah kepada penguasa ialah amalan maksiat yang merugikan atau mengganggu kepentingan awam dan merupakan kuasa hakim atau penguasa untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan berat ringannya amalan yang diperbuat. Karena tidak ada peraturan *syar’i* yang menetapkan hal itu secara konkret.

## Penutup

Dari uraian tentang gratifikasi dapat disimpulkan bahwa, dalam Islam gratifikasi mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk pemberian. Amalan-amalan gratifikasi dalam Islam adakala berupa sedekah, hibah, hadiah, dan *risywah*. Di antara beberapa bentuk gratifikasi itu dapat dibezakan sebagai

berikut. Pertama, sedekah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya alat tukar, dilakukan hanya demi memperoleh pahala di akhirat. Kedua, hibah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya alat tukar dan tanpa mengharapkan balasan apapun. Ketiga, hadiah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya balasan atau alat tukar, yang mana penyerahan itu dihantar ke tempat orang yang diberi sebagai penghormatan atau karena prestasi. Jadi perbedaan hibah dengan hadiah ialah, hadiah diberikan karena penghormatan atau karena prestasi seseorang. Dan keempat, *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau penguasa dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Pemberian itu adakalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sehingga keinginan pemberi tersebut terwujud.

Bentuk gratifikasi dalam Islam tersebut ada yang termasuk ke dalam kategori positif dan kategori amalan negatif. Gratifikasi dalam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk ke dalam amalan gratifikasi positif, amalan-amalan tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Kepada pelaku amalan gratifikasi ini akan mendapat ganjaran berupa syurga dan di dunia ini akan semakin dilipatkan gandakan hartanya, karena amalan yang tersebut termasuk bahagian dari bentuk syukur terhadap harta yang telah diamanahkan Allah padanya.

Adapun gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan *risywah* termasuk ke dalam amalan gratifikasi negatif, karena dua bentuk amalan gratifikasi ini amalannya telah disebutkan dalam *al-Qur'an* maupun hadis sebagai amalan yang dilarang syara', yaitu suatu amalan maksiat (*jarimah*), sementara dalam *nas* tidak diterangkan jenis hukuman untuknya. Dan memberikan *risywah* dalam keadaan untuk menegakkan kebenaran dan

53 *Ibid.*, hlm. 703-704.

54 *Ibid.*, hlm. 702-703.

mencegah kezaliman, menurut sebahagian ulama ada kemaafan (*rukhsah*), ketika tidak ada penyelesaian lain untuk itu.

Gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan *risywah* termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*. Untuk itu, pelaku amalan tersebut dihukum dengan hukuman dalam bentuk hukuman *ta'zir*, mulai hukuman terberat hingga hukuman teringan. Dasar dalam memilih hukuman gratifikasi ini ditentukan oleh hakim dengan mempartimbangkan maslahatnya.

## Bibliography

### Literatur

- Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abū Abdul Halim Ahmad. S., *Suap, Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Abu Dawud, *Musnah Abi Dawud*, al-Maktabah al-Syamilah, Jilid Ke-3, Hadis No. 2169, Mesir: Dar Hijr, 1999.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Bab fi Kira-hiyah al-Risyawah, Jilid Ke-3., Hadis No. 3580, hlm. 300. Al-Hakim, *Mustadrak 'Ala Sahihayn*, Jilid Ke-4, Hadis No. 7066, Beirut: Dar al-Kutub al-I'lmyah, 1990.
- 'Abd Allah bin 'Abd Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī 'al-Jina 'ī al-Islāmī*, Jilid Ke-1, Beirut: Dār al-Kutub, 1963.
- 'Abd al-'Adim Ibn Badawi al-Khalafi, *al-Wa-jiz fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz: Kitab al-Taharah wa al-Salah*, Alih Ba-hasa Tim Tashfiyah LIPIA, Bogor: Pus-taka Ibnu Katsir, 2006.
- 'Abd Ghani Ibn Isma'il, *Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risyawah wa al-Hadi-yah*, t.tp: Maktabah al-Qur'an, 2003.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, al-Maktabah al-Syamila, Bab Hadith Khalid Ibn 'Ady al-Juhany 'an al-Nabi SAW, Jil. Ke-29, Hadis No. 17936, t.tp: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid Ke-2, Makkah al-Mukar-ramah: Maktabah al-Tijariyah, t.t.
- 'Ali al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://alwarraq.com>, al-Isdār al-Thānī.
- Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab I 'ta' al-Ghani min al-Tatawu', Jil. Ke-6, Hadis No. 12043, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Sadaqah, Jilid Ke-2., Hadis No. 1410, t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Al-Bahuti, *Kasyf al-Qanna'an Matn al-Iqna'* Jilid Ke-6, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid Ke-6, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Jilid Ke-8, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Sayyid Abū Bakr, *I'ānah al-Tālibīn*, Jilid. Ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Turmidhi, *Sunan al-Turmidhi*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab fi Hassi, Jilid Ke-4, Hadis No. 2130, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Awsat*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Man Baqiyah min

- Awali Ismihi Mim min Ismihi Musa, Jilid Ke-8, Hadis No. 8235, al-Qahirah: Dar al-Haramayn, t.t.
- Eddy OS Hiarejj, "Memahami Gratifikasi", Kompas.com, 13 Juni 2011.
- Hamd Ibn 'Abd al-Rahman al-Junayd, *Atharu Risyawah fi Ta'thuri Namwi al-Iqtisadi wa Asalib Daf'iha fi Zilli Syari'ah Islamiyah*, Riyad: al-Markas al-'Arabi li Dirasah al-Amniyyah wa Tadrib, 1982.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab al-Ta'liz fi al-Hayf wa al-Risyawah, Jilid Ke-2, Hadis No. 2313, t.tp: Dar 'Ihya' al-Kitab al-'Arabiyyah, t.t.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Putra Rizki Putra, 1997.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2011.
- Malik, *Mawata' al-Imam Malik*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Ma Ja'a fi al-Ta'afuf 'an al-Masa'alah, Jilid Ke-2, Hadis No. 9, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985.
- Muhammad Amin, *Khususiyah Ibn 'Abidin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.
- Muhammad Yūsuf al-Qardāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1994.
- Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Rad al-Mikhtar 'alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn 'Abidin*, Jilid Ke-4, Beirut: Dār al-Ihyā', 1987.
- Muslim, *Sahih Muslim*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Tahrim Hadaya al-'Amal, Jilid Ke-3, Hadis No. 30, t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Keislaman yang Patut Anda Ketahu*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, t.t.
- Taqy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989.